

**ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN PP 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KOTA
BANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Sidang Sarjana Pendidikan
pada Program Studi Pendidikan Akuntansi



Oleh :
Della Aisya Putri
1705515

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2021**

**ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN PP 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KOTA
BANDUNG**

oleh:

Della Aisyah Putri

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

© Della Aisyah Putri 2021

Universitas Pendidikan Indonesia

Agustus 2021

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak ulang,
difoto kopi, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis.


**LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI
UJIAN SIDANG**

**ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN PP 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KOTA
BANDUNG**

Oleh
DELLA AISYA PUTRI
1705515

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA.,
CTA., CPA
NIP. 196612261990011002

Pembimbing II



Arvian Triantoro, S.Pd, M.Si
NIP. 1980111220005011002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi



Prof. Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA., CTA., CPA
NIP. 196612261990011002

ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN PP 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Della Aisya Putri

**Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA., CTA., CPA
2. Arvian Triantoro, S.Pd, M.Si**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan penerapan PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bandung yang diindikasikan dengan sumber daya manusia, komitmen dan disposisi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan kegiatan wawancara dengan 3 informan pejabat pemerintah Kota Bandung di Bidang Akuntansi BKAD. Data sekunder yaitu yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil pengumpulan data di analisis dengan metode kualitatif menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian yang diindikasikan dengan sumber daya manusia, komitmen dan disposisi menunjukkan kesiapan Pemerintah Kota Bandung di BKAD dalam penerapan PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kata Kunci: PP Nomor 12 tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kesiapan Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia, Komitmen, Disposisi, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

**ANALYSIS OF READINESS FOR IMPLEMENTATION PP 12 OF 2019
CONCERNING REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN THE BANDUNG
CITY GOVERNMENT**

Della Aisya Putri

**Advisor : 1. Prof. Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA., CTA., CPA
2. Arvian Triantoro, S.Pd, M.Si**

ABSTRACT

This research aims to know the readiness for the implementation of PP 12 of 2019 concerning with the Regional Financial Management in the Bandung City Government which is indicate by human resources, commitment and disposition at the Bandung City Regional Finance and Assets Agency.

The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used in the study were observation, interviews and documentation. The types of data used in this research are primary data and secondary data. Primary data are interviews with 3 informants of Bandung City government officials in the BKAD Accounting Sector. And the Secondary data which is related to this research. The results of data collection were analyzed with using qualitative methods and using triangulation techniques.

The result of the research which indicated by human resources, commitment and disposition show that the readiness of the Bandung City Government at BKAD for the implementation of PP 12 of 2019 concerning with Regional Financial Management.

Keyword: PP 12 of 2019, Regional Financial Management, the readiness of the local Government, human resources, commitment, disposition, Bandung City Regional Financial and Assets Agency

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Teori <i>Stewardship</i>	10
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	11
C. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	18
D. Perbedaan PP Nomor 58 tahun 2005 dengan PP Nomor 12 tahun 2019	24
E. PP Nomor 12 tahun 2019	25
F. Kesiapan Penerapan PP 12 tahun 2019	26
G. Sumber Daya Manusia	27
H. Komitmen	30
I. Disposisi/Sikap.....	31
J. Hasil Penelitian Terdahulu	32
K. Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38

A.	Desain Penelitian	38
B.	Definisi dan Operasionalisasi Variabel	39
C.	Jenis dan Sumber Data	41
D.	Teknik Pengumpulan Data	42
E.	Analisis Data dan Pengujian Kredibilitas Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
A.	Gambaran Obyek Penelitian.....	48
B.	Deskripsi Hasil Penelitian	53
C.	Hasil Penelitian.....	55
1.	Sumber Daya Manusia.....	56
2.	Komitmen	67
3.	Disposisi.....	69
D.	Pembahasan Hasil Penelitian	73
BAB V PENUTUP.....		81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	40
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	41
Tabel 4.1 Daftar Informan.....	54
Tabel 4.2 Jumlah Dan Jabatan Struktural	57
Tabel 4.3 Jumlah dan Komposisi Pegawai BKAD Sesuai Jenjang Pendidikan ...	59
Tabel 4.4 Daftar Sarana dan Prasarana BKAD	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus APBD	18
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 3.1 Model Interaksi Analisis Data	44
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber	46
Gambar 3.3 Triangulasi Teknik	47
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi BKAD Kota Bandung	50

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Jefri, R. (2018). *Teori Stewardship Dan Good Governance*. Economics Bosowa, 4(3), 14-28.
- Kusmayadi, & Harti, D. (2019). *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintahan*. Semarang: Erlangga.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sarwono, J. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2016), *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
- Sudarmanto. (2014). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran,dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Jurnal:

- Ajhar, A., & Pituringsih, E. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi*

- Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu).
Jurnal Akuntansi Aktual, 3, 62-73.
- Basri, Y. M. (2021). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 13-35.
- Diansari, R. E. (2017). Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah). *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 20(1), 44-58.
- Erdiansyah, D. R. (2016). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Ferina, I. S., Burhanuddin, B., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321-336.
- Herlina, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Humiang, G. P., Saerang, D. P., & Karamoy, H. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Dampaknya Terhadap Sumber Daya Manusia Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 6(2).
- Jantong, A., Nurkholis, N., & Roekhudin, R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).

- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh SDM, Insentif dan Sarana Pendukung terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 207-218.
- Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43294.
- Permana, I. B. G. Bayu., dan Wiratmaja, I. D. Nyoman. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 260-2287, Vol.16, No.3.
- Pituringih, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Sap Berbasis Akrual Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(1), 62-73.
- Pratiwi, A. I., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen, Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Bandung. *eProceedings of Management*, 4(2).
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1).
- Rahmawati, H. I., & Ayudiati, C. (2015). Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*.

- Randang, D. M., Djani, W., & Rani, L. S. (2020). Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai Dalam Penerapan E-Government. *Jurnal Administrasi dan Demokrasi (Administration and Democracy Journal)*, 1(1), 48-56.
- Ranuba, E. D., Pangemanan, S., & Pinatik, S. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Safitri, D. (2017). Faktor faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua (Studi pada skpd pemerintah kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 5(2), 174-189.
- Sampel, I. F., Kalangi, L., & Runtu, T. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrua. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Savira, A. P. W., & Yuhertina, I. (2021). Kesiapan dan Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam Rangka Reformasi Akuntansi dan Penerapan PP No. 71 Tahun 2010: Berdasarkan Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi*, 2(2), 39-49.
- Sitorus, S., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP. NO. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Widyastuti, N. M. A., Edy Sujana, S. E., Adiputra, I. M. P., & SE, S. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kabupaten Gianyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Skripsi:

Aliyah, N. (2019). Kesiapan Pondok Pesantren Dalam Menerapkan Akuntansi Pesantren (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Al-Karimiyyah) (Skripsi, Universitas Wiraraja).

Apridiyanti, A. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015) (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).

Duwi, Saputra (2016) Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Studi pada Kabupaten Sarolangun. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Husain, N. (2018). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Kebijakan Transaksi Non Tunai (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)* (skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

- Karimah, S. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung) (Universitas Telkom, S1 Akuntansi).
- Serlin Marsaulina, - (2020) Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah : Studi pada Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013-2018. (S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Sipahutar, A. F. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Sophian, M. D., Noch, R. M., & AK, M. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Survey pada Dinas Pemerintahan di Kota Bandung) (S1 Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Sulaiman, S., & Abdullah, A. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Skripsi, Universitas Bengkulu).
- Waliah, Frilia Dera (2015) Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Bandung Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung). (Other thesis, Universitas Pendidikan Indonesia).

Tesis:

- Fitrie, S. (2008). Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri No.13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai (Tesis, Universitas Sumatera Utara).
- Nurfatonah, V. (2014). Analisis faktor yang mempengaruhi kesiapan menghadapi ujian: Studi pada Siswa Kelas XI Pemasaran SMK Negeri Pasirian Tahun

Della Aisya Putri, 2021

ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN PP 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pelajaran 2013/2014 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Internet:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. (2021). Visi Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi. Tersedia: <http://bpka.bandung.go.id/>. (16 Mei 2021)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. (2019). Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tersedia: <https://bpkad.bekasikota.go.id/2019/09/13/sosialisasi-peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2019-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah/>. (6 Januari 2021).

Harian Jogja. (2019). Implikasi PP No.12/2019 terhadap Penyusunan LKPD. Tersedia: <https://news.harianjogja.com/read/2019/11/21/500/1025328/implikasi-pp-no122019-terhadap-penyusunan-lkpd>. (25 Mei 2021)

Joglo Abang. (2019). PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tersedia: <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019-pengelolaan-keuangan-daerah#:~:text=Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah%20diatur%20oleh,Daerah%20dengan%20sebuah%20Peraturan%20Pemerintah.> (30 Desember 2020).

Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan. (2020). Upaya Mewujudkan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel selaras dengan PP 12 Tahun 2019. Tersedia: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/data-publikasi/berita-terbaru/2911-upaya-mewujudkan-konsolidasi-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-yang-akurat-dan-akuntabel-selaras-dengan-pp-12-tahun-2019.html>. (6 Januari 2021).

- Kemenkeu. Sumber-sumber pendapatan daerah. Tersedia:
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>. (1 Januari 2020).
- Martani. (2019). Entitas pemerintahan. Tersedia:
<https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2019/07/Entitas-Pemerintah-25072019-1.pptx>. (25 Mei 2021).
- Sari, M. (2015). Otonomi Daerah di Indonesia. Tersedia:
<https://gurupkn.com/otonomi-daerah>. (4 April 2020).